

**IMPLIKASI KEBIJAKAN POLITIK EKONOMI PARTAI TERHADAP TINGKAT
ELEKTABILITAS PARTAI DALAM PEMILU**
*(Studi Kasus pada 5 Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia dari tahun 1997 s.d.
2014)*

Lisman Setiawan Tanjung

ABSTRACT

The mission of all political parties in the election is maximizing votes. The number of votes in the elections is a tool to measure the electability of a political party. Economic voting theory tells that government parties are held more accountable than opposition parties for the economic conditions. If economic conditions near election is good, people votes for the incumbents, otherwise for the opposition. Exchange rate can be used to measure the economic conditions of a nation on a daily basis. This research reveals the causal relationship between the result of parties' political economic policy in welfare which is measured by the exchange rate, against the parties electability in the election which is measured by the number of votes. First, this research is try to find the relation between exchange rate amd parties electability, and then try to find the voter type that most dominant and majority in Indonesia's elections and last, try to find the fastest, most effective and most efficient parties political economic policy in Indonesia.

Keyword : political party, exchange rate, number of votes

A. Pendahuluan

Indonesia telah mengalami 5 (lima) pemilihan umum legislatif yang menghasilkan partai politik urutan pertama yang sering berposisi sebagai partai pemerintah dan urutan kedua yang sering berposisi sebagai partai oposisi pemerintah dari tahun 1997 s.d. 2014 sbb :

Tabel 1. Partai Pemerintah dan Partai Oposisi Pemerintah dari tahun 1997 s.d.2014

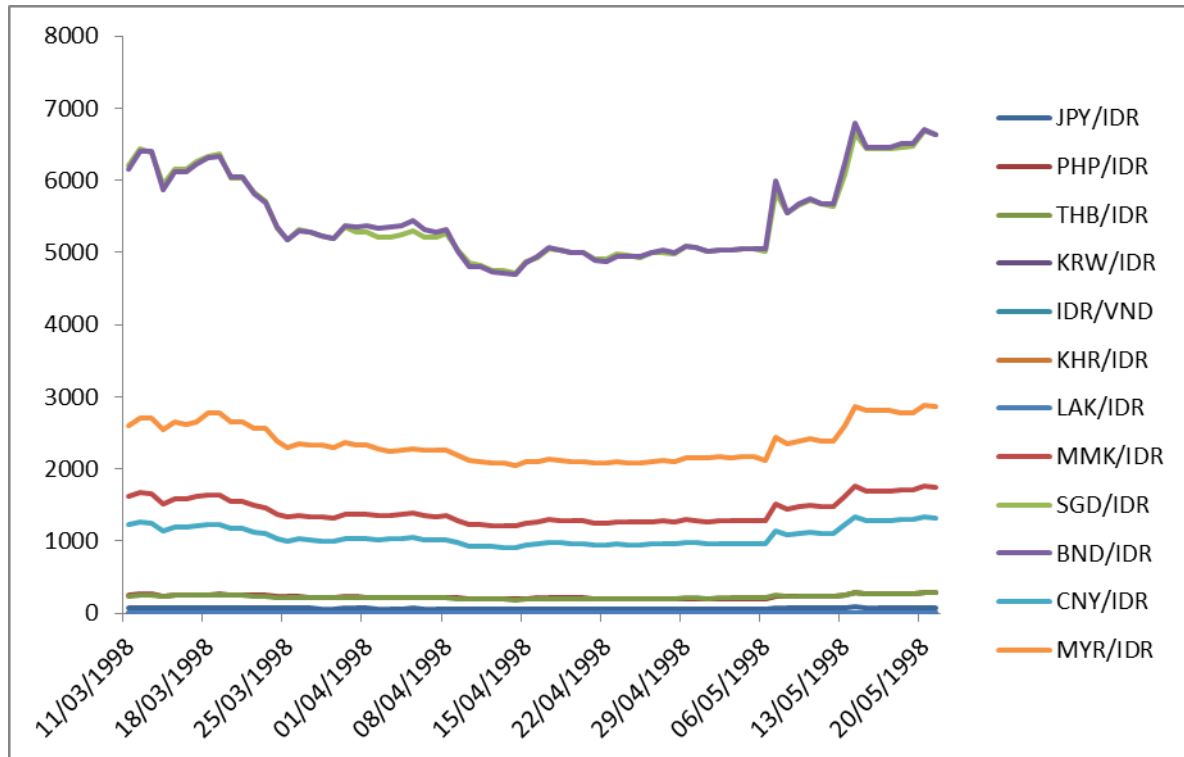
Pemilihan Umum Legislatif		1997	1999	2004	2009	2014
Partai	I	GOLKAR	PDIP	GOLKAR	PARTAI DEMOKRAT	PDIP
		325 Kursi	153 Kursi	128 Kursi	150 Kursi	109 Kursi
	II	PDIP	GOLKAR	PDIP	GOLKAR	GOLKAR
		11 Kursi	120 Kursi	109 Kursi	107 Kursi	91 Kursi

Sumber : Komisi Pemilihan Umum RI

Ada fenomena kenaikan kurs ASEAN+3 pada krisis moneter 1997-1999 secara bersamaan diiringi penurunan jumlah perolehan suara partai pemerintah (Partai Golkar) ditambah pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998, yang disertai kenaikan jumlah perolehan suara partai oposisi pemerintah (PDIP) pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 1999 dalam Grafik 1. sbb :

Grafik 1.

Kenaikan kurs ASEAN+3 pada krisis moneter 1997-1999 diikuti penurunan jumlah perolehan suara Partai Golkar ditambah pengunduran diri Presiden Soeharto pada Mei 1998 dan disertai kenaikan jumlah perolehan suara PDIP pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 1999

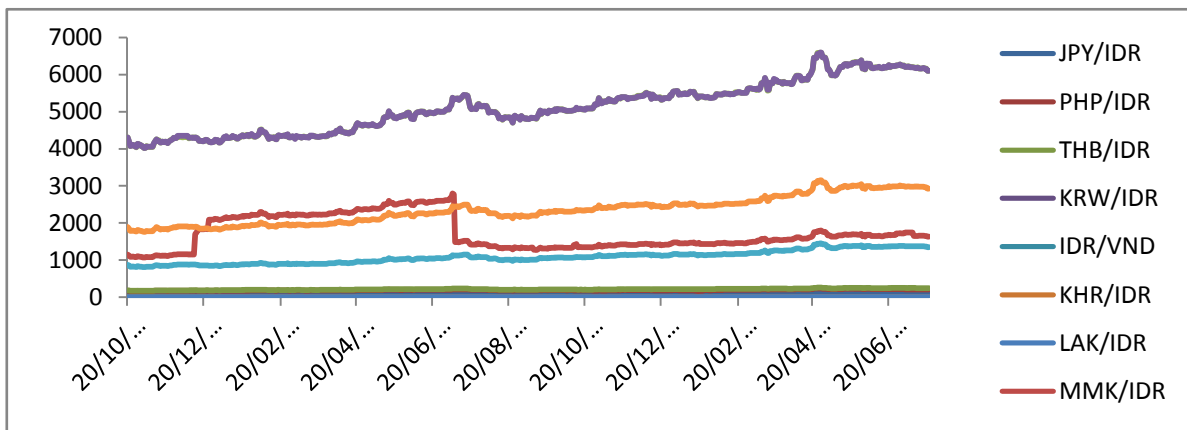


Sumber : Bank Indonesia

Fenomena kenaikan kurs ASEAN+3 ini terjadi lagi, pada masa *impeachment* Presiden Gus Dur pada Juli 2001 ditambah penurunan jumlah perolehan suara PKB pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004 dalam Grafik 2. sbb :

Grafik 2.

Kenaikan kurs ASEAN+3 pada masa *impeachment* Presiden Gus Dur pada Juli 2001 ditambah penurunan jumlah perolehan suara PKB pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004

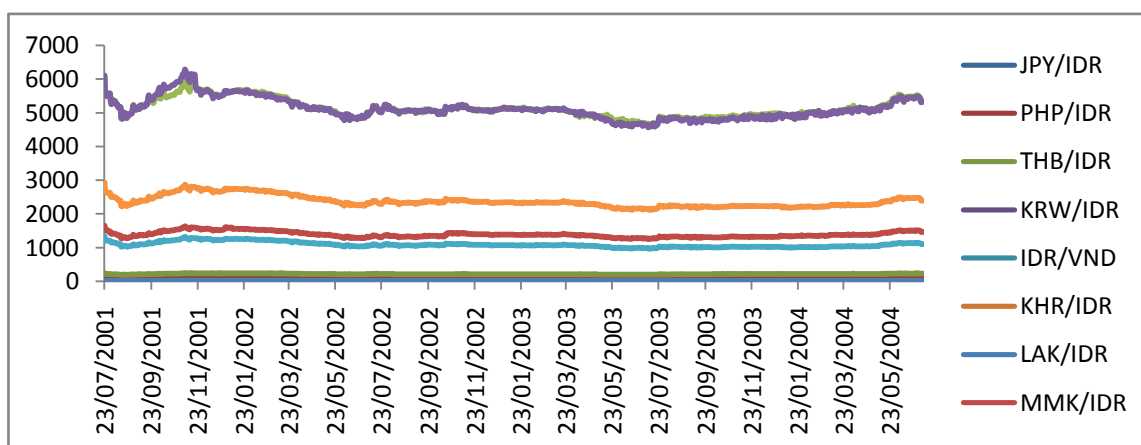


Sumber : Bank Indonesia

Fenomena kenaikan kurs ASEAN+3 terjadi lagi, diikuti penurunan jumlah perolehan suara partai pemerintah (PDIP) pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004 ditambah kekalahan Megawati sebagai calon presiden *incumbent* dari partai pemerintah (PDIP) dan kemenangan SBY sebagai calon presiden oposisi pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2004 dalam Grafik 1.3. sbb :

Grafik 3.

Kenaikan kurs ASEAN+3 diikuti penurunan jumlah perolehan suara partai pemerintah (PDIP) pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004 ditambah kekalahan Megawati sebagai calon presiden *incumbent* dan diiringi kemenangan SBY sebagai calon presiden oposisi pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2004

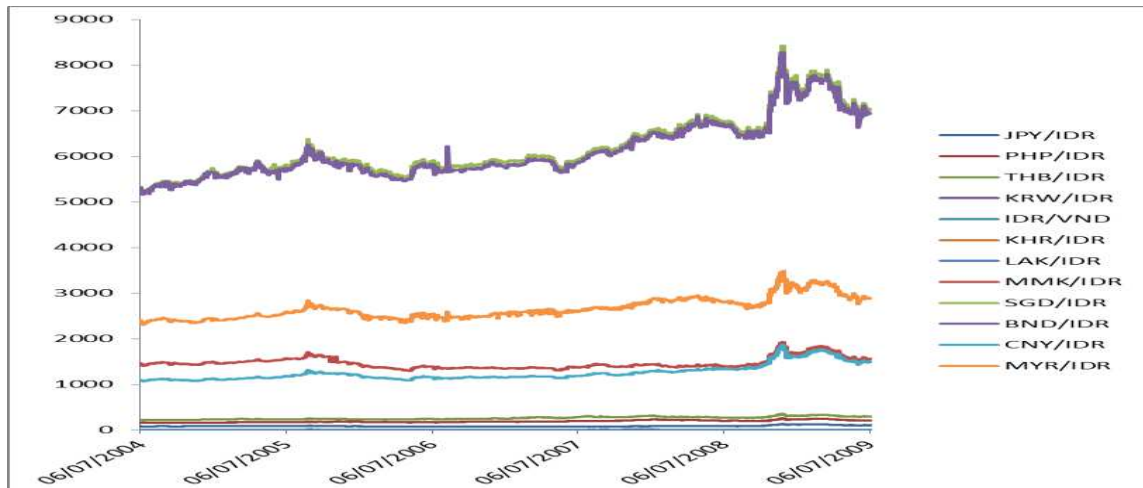


Sumber : Bank Indonesia

Kali ini fenomena penurunan kurs ASEAN+3 terjadi, diikuti kenaikan jumlah perolehan suara partai pemerintah (Partai Demokrat) ditambah kemenangan SBY untuk ke-2 kali sebagai calon presiden *incumbent* dari partai pemerintah (Partai Demokrat) dan disertai penurunan jumlah perolehan suara partai oposisi pemerintah (PDIP) pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 ditambah kekalahan ke-2 kali Megawati sebagai calon presiden oposisi dari partai oposisi pemerintah (PDIP) pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2009 dalam Grafik 1.4. sbb :

Grafik 4.

Penurunan kurs ASEAN+3 disertai kenaikan jumlah perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009 ditambah kemenangan SBY untuk ke-2 kali sebagai presiden *incumbent* dan diikuti penurunan jumlah perolehan suara PDIP ditambah kekalahan Megawati sebagai calon presiden oposisi untuk ke-2 kali pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2009

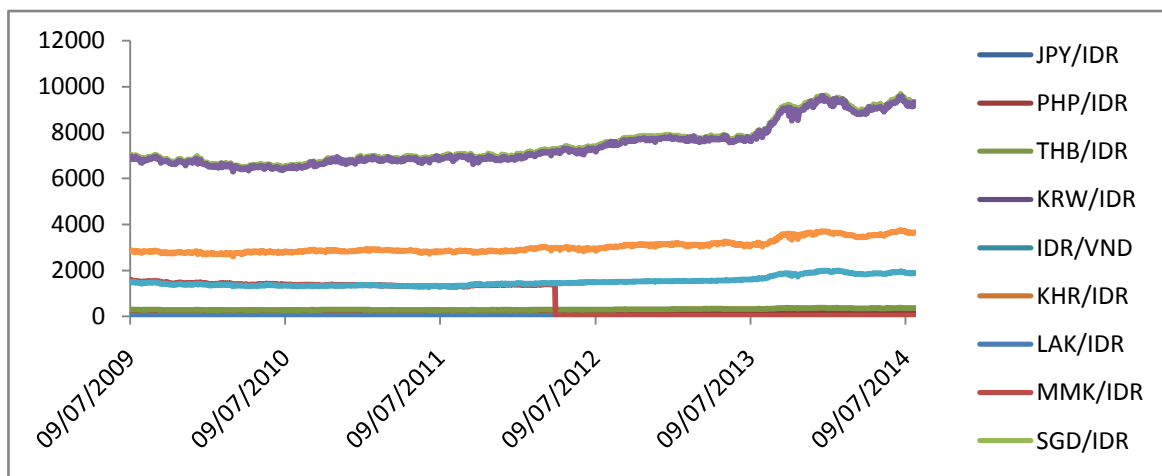


Sumber : Bank Indonesia

Fenomena kenaikan kurs ASEAN+3 terjadi lagi, diikuti penurunan jumlah perolehan suara partai pemerintah (Partai Demokrat) dan diikuti kenaikan jumlah perolehan suara partai oposisi pemerintah (PDIP) pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 ditambah kemenangan Joko Widodo sebagai calon presiden dari partai oposisi pemerintah (PDIP) pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2014 dalam Grafik 1.5. sbb :

Grafik 5.

Kenaikan kurs ASEAN+3 diikuti penurunan jumlah perolehan suara partai pemerintah (Partai Demokrat) dan disertai kenaikan jumlah perolehan suara partai oposisi pemerintah (PDIP) pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014 ditambah kemenangan Jokowi dari partai oposisi pemerintah (PDIP) sebagai presiden pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2014



Sumber : Bank Indonesia

Fenomena-fenomena diatas terkait dengan sebuah teori yang dikenal sebagai teori *Economic Voting*. Teori *Economic Voting* menjelaskan bahwa kondisi ekonomi amat mempengaruhi jumlah perolehan suara partai pemerintah atau partai oposisi pemerintah. Bila pemilih menilai kondisi ekonomi baik maka ia cenderung akan memilih partai

pemerintah dan sebaliknya bila pemilih menilai kondisi ekonomi buruk maka ia akan memilih partai oposisi pemerintah.

Theories of economic voting tell us that government parties are held responsible for economic conditions. Improvements in the economy are expected to benefit governing parties electorally and to hurt the opposition. In general, our findings support these theories. Well-specified models do indeed show that government parties are generally held more accountable than opposition parties for the condition of the economy (Van Der Brug: 2007:113).

Substantively, our map of economic voting confirms, clarifies, and extends the common wisdom about economic voting in Western democracies. Economic voting is pervasive – indeed, there is almost no variation in its broad nature across different contexts – that is, it is both overwhelmingly incumbency-oriented (i.e., a poor economy hurts incumbents and helps opposition parties) and more important to the party of the chief executive than to other incumbents (Duch:2007:113).

Teori *Economic Voting* menjelaskan bahwa kondisi ekonomi amat mempengaruhi elektabilitas partai pemerintah atau partai oposisi pemerintah. **Kurs dapat dijadikan alat untuk mengukur kondisi ekonomi suatu negara** (Sadono Sukirno:1997:23). Kurs adalah nilai tukar mata uang. Hal ini dapat dijelaskan dengan hubungan GDP dengan Konsumsi (C), Investasi (I), Belanja Pemerintah (G), Ekspor (X), Impor (M) sbb :

$$\text{GDP} = \text{C} + \text{I} + \text{G} + \text{X} - \text{M}$$

(Mankiw:2015:488)

- a. GDP (*Gross Domestic Product*) adalah nilai semua barang-barang dan jasa-jasa berdasarkan harga pasar yang dihasilkan suatu negara. Jika nilai GDP Indonesia turun maka nilai kurs Rupiah Indonesia akan mengalami penurunan.
- b. IHK (Index Harga Konsumen) adalah indikator yang mengukur harga barang/jasa konsumsi sehari-hari masyarakat yang dikenakan pada konsumen. Jika nilai IHK Indonesia naik maka nilai kurs Rupiah Indonesia akan mengalami kenaikan.
- c. TKK (Tingkat Kesempatan Kerja) adalah indikator yang mengukur jumlah lapangan kerja yang tercipta akibat investasi di suatu negara. Jika nilai TKK Indonesia naik maka nilai kurs Rupiah Indonesia akan mengalami kenaikan.
- d. NPI (Neraca Perdagangan Indonesia) adalah indikator yang menghitung nilai Ekspor Bersih suatu negara yang didapat dari nilai ekspor dikurangi dengan nilai impor. Jika nilai NPI turun maka nilai kurs Rupiah Indonesia akan mengalami penurunan.

Kurs/nilai tukar mata uang pada GDP di atas, adalah indikator yang amat penting sekali karena GDP adalah nilai semua barang dan jasa suatu negara berdasarkan harga pasar, “*A country’s real exchange rate is a key determinant of its net exports of goods and services*” (Mankiw:2015:673), karena kurs dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama sbb :

- a. Kesenjangan Daya Beli (*Purchasing Power Parity*)
Teori ini menyatakan bahwa kurs atau nilai tukar uang di antara dua negara ditentukan oleh perbedaan harga barang yang sama persis wujudnya di antara kedua negara tersebut.
- b. Kesenjangan Suku Bunga (*Interest Rate Parity*)
Teori ini menyatakan bahwa kurs atau nilai tukar uang di antara dua negara ditentukan oleh perbedaan suku bunga di antara kedua negara tersebut. Suku bunga ini terjadi

akibat inflasi. Inflasi disebabkan oleh selisih kenaikan harga barang dalam suatu waktu yang sama persis wujudnya di suatu negara.

Bila keadaan terburuk terjadi yaitu nilai Ekspor Bersih ($X - M$) dalam GDP di atas atau nilai ekspor di kurangi nilai impor suatu negara sama dengan nol atau minus, maka satu harapan dalam mempertahankan kesejahteraan rakyat berupa GDP (*Gross Domestic Product*) di atas adalah hanya melalui G (Belanja Pemerintah) (Goalstone:2007:56).

Belanja Pemerintah adalah berupa penyerapan APBN/APBD. Penyerapan APBN/APBD adalah sangat tergantung kepada arah kebijakan ekonomi pemerintah. Arah kebijakan ekonomi pemerintah sangat tergantung kepada arah kebijakan politik ekonomi partai pemerintah, berhaluan *left*, *centre* atau *right*. Politik ekonomi sendiri, berprioritas pada 2 (dua) kebutuhan dasar rakyat yaitu inflasi dan pengangguran (Hibbs Jr:1987:5).

Low unemployment-high inflation configuration in nations regularly governed by the Left and a high unemployment-low inflation pattern in political systems dominated by Center and Right parties (Hibbs Jr:1977:1).

Government ideology as corresponding to the ideology of the largest government party or the party heading the executive branch (Hartmann:2015:151).

Karena sebab-sebab di ataslah, maka masalah penelitian ini adalah menganalisis arah kebijakan politik ekonomi partai pemerintah dengan elektabilitas partai pemerintah.

Pentingnya elektabilitas partai politik (partai pemerintah/partai oposisi pemerintah) di atas karena UU No.42 Tahun 2008 menyebutkan, untuk dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sekurang-kurangnya 20% kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% suara sah secara nasional.

Pasal 9

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Hal inilah yang menjadi dasar bagi penelitian ini untuk mengangkat akibat/efek/implikasi dari kebijakan politik ekonomi partai terhadap elektabilitas partai, sebagai judul utama.

Teori *Economic Voting* di atas terkait dengan jenis pemilih rasional (Lau:2003:47). Pada jenis pemilih rasional atau *rational choice model*, pemilih memilih partai atau kandidat berdasarkan pertimbangan untung-rugi pada dirinya sendiri terlebih dahulu, berdasarkan pengalaman masa lampau (*retrospective*) atau berdasarkan masa depannya (*prospective*). Untung-rugi pada pemilih rasional digambarkan dalam persamaan sbb :

With respect to party choice, Downs assumes a two-party setting where a voter is assumed to vote for the party (s)he expects will offer her or him the highest benefit, in terms of so-called utility income. A voter determines the expected party differential', which is simply the expected utility income from the present incumbent party in the future minus that from the present opposition party. If this value is positive, (s)he votes for the incumbents, otherwise for the opposition (Schram:1991:9).

$$V = pB - C + D$$

Dimana,

V = Voter Turn Out (Jumlah Perolehan Suara Suatu Partai Pada Pemilu)

p = Probability of Vote Matter (Gunanya Memilih Bagi Pemilih)

B = Benefit of Voting (Untung Bagi Pemilih Bila Memilih Suatu Partai)

C = Cost of Voting (Rugi Bagi Pemilih Bila Memilih Suatu Partai)

D = Duty Goodwill (Wajibnya Memilih Bagi Pemilih)

Maka, jumlah perolehan suara suatu partai politik pada setiap pemilihan umum legislatif, dapat ditentukan dengan dasar persepsi pemilih rasional pada kondisi ekonomi yang baik atau GDP membaik (Untung bagi pemilih rasional) dan pada kondisi ekonomi yang buruk atau GDP memburuk (Rugi bagi pemilih rasional) sbb :

In the context of economic voting, risk and loss aversion is primarily used in the grievance-asymmetry hypothesis: the expectation that voters more readily punish governments for bad economic conditions than reward them for good economic conditions. The election outcome is explained by a vote function of the following type (Dorussen dkk:2002:1&305) :

$$C_e = \lambda + F^e (\text{economic change}) + F^p (\text{political change}) + u$$

Dimana,

Ce = The Election Outcome (Jumlah Perolehan Suara Partai Pemerintah)

Fe = Economic Change (Perubahan Ekonomi)

Fp = Political Change (Perubahan Politik)

Karena sebab-sebab di ataslah, maka masalah kedua penelitian ini adalah coba memverifikasi secara absolut apakah jenis pemilih yang paling dominan dan mayoritas di Indonesia adalah jenis pemilih rasional (*rational choice model*) atau bukan. Verifikasi model pemilih rasional tersebut menggunakan perubahan-perubahan kondisi ekonomi di Indonesia, yang diukur dengan kurs sesuai teori *Economic Voting*.

Pentingnya memverifikasi secara absolut jenis pemilih yang paling dominan dan mayoritas di Indonesia, apakah model pemilih rasional (*rational choice model*) atau bukan adalah karena kurs dapat memprediksi pemilu secara jujur sampai dengan pemilu di tingkat provinsi bahkan di tingkat kabupaten/kota, melalui kondisi ekonomi dan GDP di tingkat daerah tersebut terkait Tingkat Kerawanan Daerah berupa kemiskinan dan Indeks

Kerawanan Pemilu berupa politik uang. Kemiskinan adalah merupakan ukuran pemicu kerawanan kriminalitas dan ukuran pemicu praktik politik uang dalam setiap pemilu legislatif daerah dan setiap pemilu kepala daerah. Pentingnya memverifikasi secara absolut jenis pemilih yang paling dominan dan mayoritas di Indonesia, apakah model pemilih rasional (*rational choice model*) atau bukan adalah karena kurs dapat memprediksi psikologi politik masyarakat dalam memilih partai politik melalui kondisi ekonomi di Indonesia yang diukur dengan kurs, apakah berdasarkan pertimbangan rasional untung-rugi pada dirinya dan apakah pemilih rasional memilih berdasarkan pengalaman masa lampau (*retrospective*) atau berdasarkan masa depannya (*prospective*).

Hipotesa awal bahwa pemilih di Indonesia adalah pemilih rasional ini terbukti dengan fenomena SARS (Sindrom Amat Rindu Soeharto), terutama rasa aman dan harga murah pada waktu lampau yang jarang dijumpai pada hasil kebijakan politik ekonomi partai-partai yang ada sekarang. SARS (Sindrom Amat Rindu Soeharto) adalah psikologi politik masyarakat yang disebut *Personalismo/Generalissimo/Caudillismo/Political Bossism/Strongman* yang melahirkan paham Fascisme/Neo-Fascisme. Sejarah dunia membuktikan, Fascisme adalah reaksi politik yang lahir dari kondisi ekonomi yang amat buruk diikuti kerawanan sosial/kriminalitas yang amat tinggi, diikuti kebutuhan masyarakat akan pemimpin yang kuat dan keras.

The electoral success of neo-fascist movements fluctuates, largely with economic conditions.....because fascism is a political reaction of the disenchanted lower-middle and working classes, allied through a populist streak. This latter view was usually linked to a well developed theme of the need for firm leadership, the appeal being to the strong man (Robertson. 2002: 183 & 341-342).

Fatalnya, fascisme pasti mengarah kepada authoritarianism yang juga memiliki sejarah menciptakan kondisi ekonomi yang amat lebih buruk, seperti sejarah parah rakyat Nikaragua yang pasrah.

This description is evocative of a particular Latin American version of strong presidentialism: a system with few checks and balances in the relations between the political leader (depicted as a strong man) and the populus (depicted as a helpless collective), a system that is rather authoritarian, stages elections every now and again, but, in the meantime, hands over power to a caudillo (Hendriks:2010:57 & 90).

Furthermore, corruption directly affects people's livelihoods through its impact on the economy (Close:2004:60).

Sejarah politik menunjukkan bahwa kontinuitas pemerintahan dan elektabilitas partai pemerintah sangat amatlah tergantung sekali pada kebijakan ekonomi pemerintah itu.

All Political history shows that the standing of the Government and its ability to hold the confidence of the electorate at a General Election depend on the success of its economic policy (Hibbs Jr:2006:565).

Individual studies seem to prove, in a very detailed and convincing way, the connection between economic determinants and electoral outcomes – to the point of predicting how many extra points in inflation or in unemployment are needed in order to subtract so many points from presidential popularity or incumbent party vote totals (Eulau:1985:238).

Kebijakan ekonomi pemerintah sangat terkait dengan kebijakan politik ekonomi partai pemerintah atau partai politik yang tengah berkuasa di pemerintahan, *"Government policy outputs are best predicted by looking at the position of the party in control of the portfolio with jurisdiction over the policy area concerned"* (Hartmann:2014:96).

Bukti empiris No.1 bahwa kebijakan politik ekonomi Partai Golkar yang berorientasi pada politik keamanan sebagai infrastruktur pembangunan yaitu Karya Siaga Gatra Praja dan Tri Sukses Golkar, di implementasikan dalam visi dan misi pemerintah berupa Panca Krida Kabinet Pembangunan VI tahun 1997 sebelum Indonesia mengalami krisis moneter terburuk di dunia tahun 1998 adalah sbb :

1. Melanjutkan, meningkatkan, memperdalam dan memperluas pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertumpu pada Trilogi Pembangunan (Stabilitas, Pembangunan, Pemerataan), berwawasan Nusantara untuk memperkuat ketahanan nasional dan tekad kemandirian.
2. Meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa dalam memberikan pelayanan pada rakyat Indonesia.
3. Membudayakan mekanisme kepemimpinan nasional berdasarkan UUD 45, ideologi Pancasila, demokrasi Pancasila, Ekaprasetia Pancakarsa dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
4. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, berdasarkan prinsip hidup berdampingan secara damai dalam hubungan bilateral, regional, dan global untuk kepentingan pembangunan nasional.
5. Melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia dalam tahun 1997.

Bukti empiris No.2 bahwa kebijakan politik ekonomi Partai Demokrat yang berorientasi pada inflasi, pengangguran dan keamanan yaitu Tri Pakca Gatra Praja di implementasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2009 yang memberikan hasil berupa kenaikan amat drastis jumlah perolehan suara Partai Demokrat ditambah kemenangan berupa terpilihnya SBY sebagai Presiden RI 2 (dua) periode berturut-turut adalah sbb :

Di dalam RPJMN Tahun 2004-2009 yang telah ditetapkan dengan Petaturan Presiden Nomor 7 tanggal 19 Januari 2004 sebagai peniabaran Visi dan Misi Presiden terpilih dalam Pemilu Presiden pada tahun 2004, ditetapkan 3 Agenda Pembangunan, yaitu:

1. *Menciptakan Indonesia yang Aman dan Damai*
2. *Menciptakan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan*
3. *Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.*

Bukti empiris No. 3 bahwa kebijakan politik ekonomi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu Trisakti di implementasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 sbb :

Selanjutnya Trisakti menjadi dasar penyusunan Visi Pembangunan Nasional yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan sbb :

Pasal 4

RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RPJM Nasional bahkan sampai dengan bukti RKP di atas merupakan visi, misi, dan program Presiden yang dilandasi dari visi, misi, dan program partai politiknya yang berdasarkan dari kebijakan politik ekonomi dari AD/ART partai politiknya yang akan menjadi pedoman pembangunan dari Kementrian, Lembaga bahkan sampai dengan tingkat Pemerintahan Daerah. Ada 3 (tiga) faktor keberhasilan ekonomi yaitu partai politik, kebijakan makroekonomi dan *political business cycles* (Hibss Jr:1987:213-277). Terdapat dua jenis kebijakan makroekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal berupa pajak dan belanja pemerintah dan kebijakan moneter berupa suku bunga (Sadono Sukirno:1997:25). Dari UU No. 25 Tahun 2004 dan teori GDP di atas, kebijakan yang paling berpengaruh cepat terhadap kondisi ekonomi adalah kebijakan fiskal, berupa belanja pemerintah dan kebijakan moneter, berupa suku bunga.

Fiscal actions may affect the economy more quickly, especially when accompanied by a supportive monetary policy (Hibss Jr:1987:221).

Tapi, belanja pemerintah inilah sebagai satu-satunya jenis kebijakan yang mewakili kebijakan politik ekonomi partai pemerintah.

Karena sebab-sebab di ataslah, maka masalah ketiga penelitian ini adalah coba mencari kebijakan politik ekonomi yang paling cepat, efektif dan efisien terhadap elektabilitas partai-partai politik di Indonesia dari tahun 1997 s.d. 2014. Pencarian kebijakan politik ekonomi yang paling cepat, efektif dan efisien tersebut menggunakan perubahan-perubahan kondisi ekonomi yang diukur dengan kurs di Indonesia dengan perubahan-perubahan jumlah-jumlah perolehan suara partai pemerintah/partai oposisi pemerintah (PDIP, Golkar, Partai Demokrat) pada pemilu legislatif di Indonesia dari tahun 1997 s.d. 2014, sesuai teori *Economic Voting* di atas.

B. Metode Penelitian

Desain penelitian ini adalah jenis riset statistik (*statistical research*). Riset statistik (*statistical research*) adalah riset pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap data-data statistik yang mampu memberikan informasi kuantitatif. Data-data statistik yang digunakan adalah data-data statistik resmi dari pemerintah Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan RI, Kementerian Perdagangan RI, Komisi pemilihan Umum RI (KPU), ASEAN (*Association of South East Asian Nation*), UN (*United Nation*), *World Bank*, IMF

(*International Monetary Fund*) dan lain-lain yang mewakili data-data informasi kuantitatif yang akan dianalisis oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan angka-angka statistik tetapi juga menggunakan teks deskriptif untuk menjelaskan angka-angka statistik tersebut.

Tipe penelitian ini ialah tipe penelitian eksplanatori, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel. Penelitian ini bertujuan sbb:

1. Meneliti hubungan kurs (sebagai variabel X) dengan elektabilitas partai politik (sebagai variabel Y).
2. Mencari kebijakan politik ekonomi yang paling cepat, efektif dan efisien dari partai-partai yang berkuasa dari tahun 1997 s.d. 2014 sebagai faktor kausalitas atas kondisi ekonomi di Indonesia, dengan menggunakan kurs.
3. Mencari/memverifikasi secara absolut jenis pemilih yang dominan dan mayoritas di Indonesia, dengan menggunakan kurs.

Populasi pertama dalam penelitian ini ialah populasi kurs Rupiah harian selama 5 tahun menjelang pemilihan umum legislatif di Indonesia, artinya jumlah populasi adalah 365 kurs harian x 5 tahun = 1825 hari. Sampel kurs Rupiah harian yang digunakan ialah kurs Rupiah terhadap mata uang negara-negara ASEAN+3 dan Dollar Amerika Serikat. Dengan menggunakan rumus *Slovin* dalam menentukan sampel sbb:

$$n = \frac{N}{N(d^2) + 1}$$

Dimana,

N = Jumlah populasi, 1825 hari.

d = *Confidence level* ±90 - 95% dengan sig. = ±0,1 - 0.05 dengan
Margin of Error ± 3%

n = 125 hari

Angka 125 hari diambil **sebelum** Pemilihan Umum Legislatif, berdasarkan teori *Political Business Cycles* bahwa jumlah perolehan suara partai pemerintah ditentukan oleh kondisi ekonomi yang terjadi sesaat sebelum menjelang mendekati pemilihan umum sbb :

Electoral outcomes are influenced significantly by macroeconomic performance, and voters weight election day performance more heavily than performance earlier in the term. Therefore incumbents lose less from early poor performance than they gain from good performance nearer election day (Hibbs Jr:1987:256).

Populasi kedua dalam penelitian ini ialah populasi jumlah perolehan suara partai-partai politik pada tiap pemilihan umum legislatif di Indonesia dari tahun 1997 s.d. 2014. Sampel jumlah perolehan suara partai-partai politik yang digunakan ialah jumlah perolehan suara partai-partai politik urutan pertama/partai pemerintah dan urutan kedua/partai oposisi pemerintah dalam tiap pemilihan umum legislatif dari tahun 1997 s.d. 2014 yaitu Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan dokumentasi berupa dokumen data-data statistik. Instrumen penelitian yang digunakan adalah instrumen observasi berupa pedoman berbentuk gambaran (*snapshot*) mengenai situasi variabel. Kualitas instrumen ditentukan oleh dua kriteria utama: validitas dan reliabilitas (Nazir:1988). Validitas adalah akurasi alat ukur terhadap yang diukur, sedangkan reliabilitas adalah kesamaan ukuran walaupun dilakukan berkali-kali dan di mana-mana. Validitas dan reliabilitas data penelitian ini secara tidak langsung sudah melewati uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan oleh badan-badan statistik penyediannya, akan tetapi peneliti untuk memastikan kualitas data juga kembali menggunakan uji validitas dan reliabilitas serta menggunakan cara mengkomparasi satu sama lain kesamaan data-data statistik tersebut.

Teknik analisis dalam penelitian kuantitatif ini diawali dengan analisis deduktif dari tabel dan grafik sehingga didapatkan hipotesa awal. Hipotesa awal tersebut bertujuan untuk dijadikan sebagai patokan dalam arah penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian verifikatif melalui penggunaan teknik analisis korelasi dan teknik analisis kausa relasi. Teknik analisis korelasi yang digunakan berupa teknik analisis *Pearson Product Moment*, sedangkan teknik analisis kausa relasi yang digunakan berupa teknik analisis regresi berganda. Teknik analisis yang digunakan adalah khusus teknik-teknik analisis statistik parametrik, dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 21.0.

C. Pembahasan

Analisis Korelasi *Pearson Product Moment*

Analisis korelasi *Pearson Product Moment* berguna untuk mengetahui ada atau tidak adanya hubungan antara variabel *dependent* dengan variabel *independent*, berikut dengan kekuatan hubungannya. Dalam analisis korelasi *Pearson Product Moment* ini, dimana dasar pengambilan keputusan tidak ada hubungan atau ada hubungan adalah sbb:

1. Jika Sig. (2-tailed) > α , maka tidak ada hubungan.
2. Jika Sig. (2-tailed) < α , maka ada hubungan.

Interval kekuatan hubungan sbb :

Koefisien	Kekuatan Hubungan
0,00	Tidak ada hubungan
0,01 – 0,09	Hubungan kurang berarti
0,10 – 0,29	Hubungan lemah
0,30 – 0,49	Hubungan moderat
0,50 – 0,69	Hubungan kuat
0,70 – 0,89	Hubungan sangat kuat
>0,90	Hubungan mendekati sempurna

Maka hasil analisis korelasi *Pearson Product Moment* dengan menggunakan SPSS 21.0 sbb:

- a. Hubungan kurs Rupiah dengan jumlah perolehan suara PDIP dan Golkar pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 1999

	Sig. (Two Tailed) Dengan Jumlah Suara PDIP	Sig. (Two Tailed) Dengan Jumlah Suara GOLKAR	α	Koefisien Dengan Jumlah Suara PDIP	Koefisien Dengan Jumlah Suara GOLKAR	Status	Hasil Hipotesa	Arah Hubungan Dengan Jumlah Suara PDIP	Arah Hubungan Dengan Jumlah Suara GOLKAR	Hubungan Dengan Jumlah Suara PDIP	Hubungan Dengan Jumlah Suara GOLKAR	Kekuatan Hubungan Dengan Jumlah Suara PDIP	Kekuatan Hubungan Dengan Jumlah Suara GOLKAR
Yen Jepang	.000	.000	0.05	.739 ^{**}	-.744 ^{**}	Ada Hubungan	Ho ditolak	Positif	Negatif	Signifikan	Signifikan	Hubungan Sangat Kuat	Hubungan Sangat Kuat
Peso Philippine	.000	.000	0.05	.636 ^{**}	-.643 ^{**}	Ada Hubungan	Ho ditolak	Positif	Negatif	Signifikan	Signifikan	Hubungan Kuat	Hubungan Kuat
Baht Thailand	.000	.000	0.05	.743 ^{**}	-.746 ^{**}	Ada Hubungan	Ho ditolak	Positif	Negatif	Signifikan	Signifikan	Hubungan Sangat Kuat	Hubungan Sangat Kuat
Won Korea	.000	.000	0.05	.799 ^{**}	-.801 ^{**}	Ada Hubungan	Ho ditolak	Positif	Negatif	Signifikan	Signifikan	Hubungan Sangat Kuat	Hubungan Sangat Kuat
Dong Vietnam	.002	.002	0.05	.633 ^{**}	-.630 ^{**}	Ada Hubungan	Ho ditolak	Positif	Negatif	Signifikan	Signifikan	Hubungan Kuat	Hubungan Kuat
Riel Kamboja	.001	.001	0.05	.694 ^{**}	-.601 ^{**}	Ada Hubungan	Ho ditolak	Positif	Negatif	Signifikan	Signifikan	Hubungan Kuat	Hubungan Kuat
Kip Laos	.027	.030	0.05	-.494 [*]	.425 [*]	Ada Hubungan	Ho ditolak	Negatif	Positif	Tidak Signifikan	Tidak Signifikan	Hubungan Moderat	Hubungan Moderat
Kuat Myanmar	.000	.000	0.05	.639 ^{**}	-.645 ^{**}	Ada Hubungan	Ho ditolak	Positif	Negatif	Signifikan	Signifikan	Hubungan Kuat	Hubungan Kuat
Dollar Singapore	.000	.000	0.05	.635 ^{**}	-.640 ^{**}	Ada Hubungan	Ho ditolak	Positif	Negatif	Signifikan	Signifikan	Hubungan Kuat	Hubungan Kuat
Dollar Brunei	.001	.001	0.05	.613 ^{**}	-.620 ^{**}	Ada Hubungan	Ho ditolak	Positif	Negatif	Signifikan	Signifikan	Hubungan Kuat	Hubungan Kuat
Yuan China	.000	.000	0.05	.670 ^{**}	-.675 ^{**}	Ada Hubungan	Ho ditolak	Positif	Negatif	Signifikan	Signifikan	Hubungan Kuat	Hubungan Kuat
Ringgit Malaysia	.000	.000	0.05	.643 ^{**}	-.647 ^{**}	Ada Hubungan	Ho ditolak	Positif	Negatif	Signifikan	Signifikan	Hubungan Kuat	Hubungan Kuat
Dollar US	.000	.000	0.05	.670 ^{**}	-.675 ^{**}	Ada Hubungan	Ho ditolak	Positif	Negatif	Signifikan	Signifikan	Hubungan Kuat	Hubungan Kuat

- b. Hubungan kurs Rupiah dengan jumlah perolehan suara PDIP dan Golkar pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004

Kekuatan Hubungan Dengan Jumlah Suara GOLKAR	Kekuatan Hubungan Dengan Jumlah Suara PDIP	Kekuatan Hubungan Dengan Jumlah Suara GOLKAR
Hubungan Moderat	Hubungan Moderat	Hubungan Moderat
Hubungan Kurang Berarti	Hubungan Kurang Berarti	Hubungan Kurang Berarti
Hubungan Sangat Kuat	Hubungan Sangat Kuat	Hubungan Sangat Kuat
Hubungan Sangat Kuat	Hubungan Sangat Kuat	Hubungan Sangat Kuat
Hubungan Lemah	Hubungan Lemah	Hubungan Lemah
Hubungan Moderat	Hubungan Moderat	Hubungan Moderat
Hubungan Moderat	Hubungan Moderat	Hubungan Moderat
Hubungan Mendekati Sempurna	Hubungan Mendekati Sempurna	Hubungan Mendekati Sempurna
Hubungan Sangat Kuat	Hubungan Sangat Kuat	Hubungan Sangat Kuat
Hubungan Sangat Kuat	Hubungan Sangat Kuat	Hubungan Sangat Kuat
Hubungan Kuat	Hubungan Kuat	Hubungan Kuat
Hubungan Kuat	Hubungan Kuat	Hubungan Kuat
Hubungan Moderat	Hubungan Moderat	Hubungan Moderat

- c. Hubungan kurs Rupiah dengan jumlah perolehan suara PDIP dan Partai Demokrat pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2009

n Kekuatan Hubungan Dengan Jumlah Suara PDIP	Kekuatan Hubungan Dengan Jumlah Suara GOLKAR
Hubungan Moderat	Hubungan Moderat
Hubungan Moderat	Hubungan Moderat
Hubungan Moderat	Hubungan Moderat
Hubungan Kurang Berarti	Hubungan Kurang Berarti
Hubungan Lemah	Hubungan Lemah
Hubungan Lemah	Hubungan Lemah
Hubungan Moderat	Hubungan Moderat
Hubungan Moderat	Hubungan Moderat
Hubungan Lemah	Hubungan Lemah
Hubungan Lemah	Hubungan Lemah
Hubungan Moderat	Hubungan Moderat
Hubungan Lemah	Hubungan Lemah
Hubungan Moderat	Hubungan Moderat

D. Penutup

Kesimpulan penelitian sbb :

1. Kurs memiliki hubungan dengan elektabilitas partai.
2. Kurs secara harian dapat dijadikan elektabilitas secara harian bagi partai pemerintah.
3. Kurs yang paling signifikan menggambarkan elektabilitas partai pemerintah dan partai oposisi pemerintah adalah kurs Kyat Myanmar.
4. Berdasarkan analisis atas teori *political business cycle*, kebijakan politik ekonomi yang paling cepat, efektif dan efisien adalah penyerapan anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Agama, dengan sasaran inflasi dan pengangguran.
5. Berdasarkan analisis atas jenis pemilih, jenis pemilih yang dominan dan mayoritas di Indonesia adalah jenis pemilih rasional atau *rational choice model* (pemilih dengan

pertimbangan untung rugi dalam memilih partai politik atau calon presiden), bertipe *retrospective* atau retrospektif (melihat masa lampau).

6. Kenaikan kurs Rupiah pasti disertai penurunan jumlah perolehan suara partai pemerintah bersamaan dengan kenaikan jumlah perolehan suara partai oposisi pemerintah, begitupun sebaliknya.
7. Kurs Rupiah memiliki kekuatan s.d. mendekati sempurna dengan jumlah perolehan suara partai pemerintah dan partai oposisi pemerintah di Indonesia.
8. Kurs memiliki hubungan dengan jumlah perolehan suara partai pemerintah dan partai oposisi pemerintah.
9. Kurs dapat dijadikan indikator elektabilitas partai pemerintah.
10. Kurs dapat dijadikan indikator kecepatan, keefektifan dan keefisienan kebijakan politik ekonomi (ideologi politik ekonomi partai, sistem politik ekonomi partai, jenis politik ekonomi partai, program ekonomi partai dan *demand* atas politik ekonomi partai) bagi partai pemerintah dan presiden yang tengah berkuasa pada pemerintahan.

Saran penelitian sbb :

1. Pada penelitian selanjutnya akan lebih baik jika menambahkan analisis korelasi antara hubungan kurs dengan jumlah perolehan suara calon presiden dari partai pemerintah (*incumbent ruling party*) dan calon presiden dari partai oposisi pemerintah (*opposition party*) dalam setiap Pemilihan Umum Presiden.
2. Pada penelitian selanjutnya akan lebih baik jika analisis korelasi regresi menggunakan analisis korelasi regresi kanonik.
3. Karena peraturan maksimal 20 halaman untuk jurnal ini oleh Magister Ilmu Politik Undip, maka hasil analisis regresi penelitian ini yang berisi persamaan untuk memprediksi jumlah perolehan suara partai politik di Indonesia dengan sangat akurat dan program-program politik ekonomi yang mana yang paling cepat, paling efektif dan paling efisien untuk elektabilitas partai politik pada pemilihan umum legislatif tingkat nasional maupun tingkat daerah di Indonesia, tidak dapat dimuat oleh peneliti. Apabila memerlukan untuk keperluan tesis saja, hubungi peneliti pada email : lisman.st@gmail.com atau hubungi pada 0838.9127.1000.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Dryzek, John S., Honig, Bonnie and Phillips, Anne. (2006). *The Oxford Handbook of Political Theory*. New York USA : Oxford University Press
- Weingast, Barry R. and Wittman, Donald A. (2006). *The Oxford Handbook of Political Economy*. New York USA : Oxford University Press
- Sears, David O. and Huddy, Leonie dan Jervis, Robert. (2003). *The Oxford Handbook of Political Psychology*. New York USA : Oxford University Press
- Goodin, Robert E. and Tilly, Charles. (2006). *The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis*. New York USA : Oxford University Press
- Whittington, Keith E., Kelemen, R. Daniel and Caldeira, Gregory A. (2008). *The Oxford Handbook of Law and Politics*. New York USA : Oxford University Press
- Rhodes R.A.W., Binder, Sarah A. and Rockman, Bert A. (2008). *The Oxford Handbook of Political Institutions*. New York USA : Oxford University Press
- Dalton, Russell J. and Klingemann, Hans-Dieter. (2006). *The Oxford Handbook of Political Behavior*. New York USA : Oxford University Press
- Boix, Carles and Stokes, Susan C. (2006). *The Oxford Handbook of Comparative Politics*. New York USA : Oxford University Press
- Steffensmeier, Janet M.B., Brady, Henry E. and Collier, David. (2006). *The Oxford Handbook of Political Methodology*. New York USA : Oxford University Press
- Moran, Michael, Rein, Martin and Goodin, Robert E. (2006). *The Oxford Handbook of Public Policy*. New York USA : Oxford University Press

- Reus-Smit, Christian and Snidal, Duncan. (2006). *The Oxford Handbook of International Relations*. New York USA: Oxford University Press
- Hibbs Jr., Douglas A. (1987). *The American Political Economy : Macroeconomics and Electoral Politics*. Cambridge, Massachusetts, and London, England : Harvard University Press
- Goalstone, David. (2007). *Macrofoundations of Political Economy and Development : Survival Conditions Analysis*. New York USA : Palgrave Macmillan
- Caporaso, James A. and Levine, David P. (1992). *Theories of Political Economy*. New York USA : Cambridge University Press
- Gilpin, Robert. (1987). *The Political Economy of International Relations*. New Jersey USA : Princeton University Press
- Gilpin, Robert. (2001). *Global Political Economy*. New Jersey USA : Princeton University Press
- Wilensky, Harold L.. (2002). *Rich Democracies - Political Economy, Public Policy, and Performance*. California USA : University Of California Press
- Sadono Sukirno. (1997). *Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Dominick Salvatore. (2013). *International Economics 11th Edition*. New Jersey USA : Wiley Publisher
- N. Gregory Mankiw. (2014). *Principles of Economics 7th Edition*. Stamford USA : Cengage Learning
- Shamah, Shani B. (2003). *Foreign Exchange Primer*. Chicester UK : Wiley Publisher
- Schram, Dr. Arthur J.H.C. (1991). *Voter Behavior in Economic Perspective*. Amsterdam Netherland : Springer-Verlag
- Lau, Richard R. dan Redlawsk, David P. (2006). *How Voters Decide, Information Processing during Election Campaigns*. New York USA : Cambridge University Press
- Adams, James F. (2005). *A Unified Theory of Party Competition*. New York : Cambridge University Press
- Van Der Brug, Wouter, Van Der Eijk, Cees and Franklin, Mark. (2007). *The Economy and The Vote : Economic Conditions and Elections in Fifteen Countries*. Newyork USA : Cambridge University Press
- Duch, Raymond M. and Stevenson, Randolph T.. (2007). *The Economic Vote : How Political and Economic Institutions Condition Election*. Newyork USA : Cambridge University Press
- Dorussen, Hans dan Taylor, Michael. (2002). *Economic Voting*. New York USA : Routledge
- Tucker, Joshua A. (2006). *Regional Economic Voting : Russia, Poland, Hungary, Slovakia and The Czech Republic, 1990-1999*. New York USA : Cambridge University Press
- Sebastian Hartmann. (2015). *Partisan Policy Making in Western Europe : How Ideology Influences the Content of Government Policies*- Amsterdam : Verlag Springer.
- David Close dkk. (2004). *Undoing Democracy : The Politics of Electoral Caudillismo*. Plymouth UK : Rowman & Littlefield Publisher.
- David Robertson. (2002). *The Routledge Dictionary of Politics 3rd Edition*. London : Taylor & Francis Group.
- Frank Hendriks. (2010). *Vital Democracy : A Theory Of Democracy In Action*. New York : Oxford University Press.
- Nazir, PhD, Mohamad. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Agusta, Ivanovich. (2011). *Ketrampilan Penelitian Kuantitatif*. Bogor: Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor
- Best, Henning dan Wolf, Christof. (2014). *The SAGE Handbook of Regression Analysis and Causal Inference*. London : SAGE Publications Ltd
- Pearl, Judea, Glymour, Madelyn dan Jewell, Nicholas P. (2016). *Causal Inference in Statistics : A Primer*. Chichester UK : Wiley
- Huynh, Van Nam, Kreinovich, Vladik dan Sriboonchitta, Songsak. (2016). *Causal Inference in Econometrics*. Switzerland : Springer

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta Indonesia

Merriam Webster, Inc. (2008). *Merriam Webster Collegiate Dictionary*. New York : Merriam Webster, Inc

JURNAL ARTIKEL ILMIAH

Takayuki Higashikata dan Koichi Kawamura. (2015). *Voting Behavior in Indonesia from 1999 to 2014, Religious Cleavage or Economic Performance ?*. Institute of Developing Economies : Ide Discussion Paper No. 512.

Christopher J. Anderson. (2000). *Economic Voting and Political Context : Comparative Perspective*. Electoral Studies : Pergamon.

Simon Weshle. (2013). *Two Types of Economic Voting : How Economic Conditions Jointly Affect Vote Choice and Turnout*. Duke University.

Emmerling, Johannes. (2004). *Political Determinants of Currency Crises : Evidence From Four Countries*. Berlin : German Institute for Economic Research (DIW)

Burgoon, Brian, Demetriades, Panicos and Underhill, Geoffrey R.D.. (2008). *Financial Liberalisation and Political Variables : a Response to Abiad and Mody*. University of Leicester, Department of Economics : Working Paper No. 08/30 September 2008

Steinberg, David and Walter, Stefanie. (2015). *The Political Economy of Exchange Rate Policy*. Philadelphia and Heidelberg : University of Pennsylvania and University of Heidelberg

Leblang, David. (2000). *The Political Economy of Exchange Rate Policy*. Colorado USA : Journal Of Department Of Political Science

Ajoy Datta, Harry Jones, Vita Febriany, Dan Harris, Rika Kumala Dewi, Leni Wild and John Young. (2011). *The Political Economy of Policy Making In Indonesia*. London : Overseas Development Institute : Working Paper 340

Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. (2010). "Menuju Asean Economic Community 2015". Jakarta Indonesia: Kementrian Perdagangan RI

ASEAN Secretariat. (2008). "Declaration On The Asean Economic Community Blueprint". Jakarta Indonesia: ASEAN Secretariat

Center for Asian Legal Exchange. (2011). "Framework of the ASEAN Plus Three Mechanisms Operating in the Sphere of Economic Cooperation". Jakarta Indonesia : CALE

Asian Economic Integration Monitor. (2013). "Toward an ASEAN Economic Community and Beyond". Jakarta Indonesia : AEIM

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Islam, Muhammad. (2014). Program Ekonomi PDI Perjuangan 2015-2019. Jakarta : Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golongan Karya.

Ary Mardjono. (1993). *Program Umum Golongan Karya*. Sekjen DPP Golkar.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

Grand Strategy DPP Partai Demokrat Periode 2005-2010.

Partai Demokrat. (2011). Program Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta : Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

Departemen Keuangan Republik Indonesia. (1999). *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1998/1999*. Jakarta Indonesia.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2005). *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2005*. Jakarta Indonesia

Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2009). *Laporan Semester I Tahun 2009*. Jakarta Indonesia.

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2009). *Rencana Kerja Pemerintah, Buku I Prioritas*

Pembangunan, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pembiayaan Pembangunan. Jakarta.

Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2014). *Rencana Kerja Pemerintah, Buku I Tema, Prioritas Pembangunan dan Kerangka Ekonomi Makro.* Jakarta.

Departemen Keuangan Republik Indonesia. (2014). *Laporan Semester I Tahun 2014.* Jakarta Indonesia.

SUMBER UTAMA LAIN

Data-data statistik kurs/nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang negara-negara ASEAN+3 dan mata uang Dollar milik negara Amerika Serikat (US Dollar). (2014). Dalam <http://www.bi.go.id> dan dari situs resmi ASEAN (Association of South East Asian Nation), UN (United Nation), World Bank, IMF (International Monetary Fund). Di unduh pada tanggal 2 Desember 2014 pukul 19.30 WIB.

Data-data statistik makroekonomi dan mikroekonomi Republik Indonesia. (2014). Dalam <http://www.bps.go.id>. Di unduh pada tanggal 2 Desember 2014 pukul 19.45 WIB.

Perolehan Suara Sah Partai Politik Secara Nasional. (2014). Dalam <http://www.kpu.go.id>. Di unduh pada tanggal 2 Desember 2014 pukul 20.00 WIB.

Hasil Penghitungan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014. (2014). Dalam <http://www.bps.go.id>. Di unduh pada tanggal 2 Desember 2014 pukul 20.30 WIB.